

Terms of Reference Template for Consultant Recruitment

I. Position Information

Job code title : Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Sulawesi Tengah

Department : Program – PMU RBP REDD+ GCF O2 - Sulteng

Report to : Team Leader Kemitraan

II. Background

Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan keterkaitan yang jelas antara target, rencana kerja, serta pelaksanaan di lapangan. Di Provinsi Sulawesi Tengah, inventarisasi GRK yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar untuk mengenali sumber emisi dan potensi serapan. Kerangka kebijakan nasional saat ini mengacu antara lain pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 menunjukkan peran penting sektor kehutanan sebagai penyerap GRK. Laporan tersebut juga mencatat penurunan angka emisi gabungan sektor energi, pertanian, kehutanan, dan limbah dari 23.129,57 Gg CO₂e pada tahun 2020 menjadi 13.184,88 Gg CO₂e pada tahun 2022, atau sekitar 42,99%. Angka gabungan ini memberikan gambaran umum kondisi provinsi, tetapi kontribusi setiap kegiatan FOLU terhadap perubahan emisi perlu ditelaah secara tersendiri dengan data dan metode yang konsisten.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyiapkan pemutakhiran inventarisasi GRK dan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Karena itu, penyusunan arah kerja sektor FOLU perlu menggunakan data terbaru yang telah divalidasi, menjelaskan sumber dan batasan data, serta menjaga keselarasan dengan perencanaan penurunan emisi GRK tingkat provinsi.

Pada tingkat nasional, Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) memuat komitmen penurunan emisi GRK hingga tahun 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Indonesia selanjutnya menyampaikan Second NDC kepada UNFCCC pada tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai bagian penting dari upaya pengurangan emisi dan peningkatan serapan GRK.

Sasaran nasional FOLU Net Sink 2030 adalah tercapainya tingkat serapan bersih sekitar 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Pencapaiannya memerlukan tindakan yang saling mendukung, antara lain pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem, pengelolaan mangrove, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dan pemegang perizinan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui proses yang melibatkan para pihak pada tahun 2023. Dokumen tersebut memuat sembilan aksi mitigasi yang terkait dengan kontribusi provinsi, termasuk pencegahan

deforestasi, pengelolaan dan peningkatan cadangan karbon hutan, perlindungan areal bernilai konservasi tinggi, serta pengelolaan mangrove. Renja juga menetapkan arahan lokasi menggunakan Indeks Prioritas Lokasi yang mempertimbangkan jasa lingkungan, kondisi biofisik, dan tipologi kelembagaan, serta menguraikan kebutuhan pendanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, arah aksi dan lokasi prioritas telah tersedia, tetapi capaian pelaksanaan Renja pada tahun 2024–2025 perlu dihimpun dan diverifikasi secara sistematis. Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan, lokasi, peran pelaksana, pendanaan, serta kendala di tingkat tapak diperlukan untuk mengenali kesenjangan dan menentukan tindak lanjut. Renja sendiri menempatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan rencana dan membuka ruang pemutakhiran sesuai kondisi lokasi serta perkembangan kebijakan. Evaluasi ini perlu menyandingkan Renja FOLU dengan Renja Dinas Kehutanan, rencana kerja KPH dan Tahura, serta rencana OPD dan pelaku terkait.

Atas dasar itu, Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah perlu disusun sebagai penjabaran pelaksanaan dan pemutakhiran prioritas dalam Renja FOLU. Peta jalan akan menghubungkan hasil evaluasi dengan kegiatan dan lokasi prioritas, target tahunan sampai 2030, penanggung jawab, kebutuhan dukungan dan pendanaan, serta indikator pemantauan. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif bersama Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, OPD terkait, unit pelaksana teknis kementerian, pemegang perizinan, kelompok masyarakat, dan para pihak lain sesuai perannya. Dengan demikian, peta jalan dapat menjadi acuan bersama untuk memperbaiki koordinasi, mengintegrasikan kegiatan ke dalam perencanaan masing-masing lembaga, dan memantau kontribusi Sulawesi Tengah terhadap target FOLU Net Sink 2030.

III. Job Purpose

KEMITRAAN akan merekrut tenaga ahli perorangan sebagai Konsultan, dengan tugas utama untuk menyusun Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai acuan bersama para pihak, dengan sektor kehutanan sebagai aktor utama (leading sector), dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan penurunan emisi GRK. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun pada tahun 2023, serta Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan Renstra OPD tahun 2024–2025, dengan membandingkan target dan realisasinya dengan mengidentifikasi penyebab kesenjangan, hambatan implementasi dan kualitas bukti capaian, sehingga kontribusi dan prioritasnya dapat dipetakan sesuai lingkup RO FOLU, seperti capaian rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan eksisting hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan ProKlim serta pengelolaan hutan lestari dalam mendukung penurunan emisi GRK provinsi;
2. Menyusun analisis pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030 yang berbasis sumber verifikasi dari berbagai sektor untuk meninjau kembali prioritas aksi dan lokasi berdasarkan potensi mitigasi, kelayakan pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan pendanaan, sebagai rujukan dalam menyusun dokumen peta jalan FOLU Net Sink.
3. Menyusun dan melakukan konsultasi publik Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 secara partisipatif bersama para pihak sektor lahan dan kehutanan, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi beserta KPH dan Tahura, serta OPD terkait;
4. Merumuskan rekomendasi Renja FOLU Net Sink 2030 berdasarkan hasil analisis untuk penyesuaian Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan OPD terkait. Penyelerasan dengan RAD GRK (Bappeda) dan mekanisme pemantauan melalui sistem AKSARA, untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

IV. Principal Accountabilities

Konsultan bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan dokumen Peta Jalan FOLU Net Sink 2030. Tugas dan kegiatan yang akan dijalankan, termasuk pada:

1. Melakukan studi literatur dan menyiapkan rencana kerja detail, termasuk didalamnya metodologi serta jadwal pelaksanaan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kehutanan untuk menyepakati metodologi, rencana kerja, dan penugasan untuk penyusunan dokumen Peta Jalan FOLU Net Sink 2030.
3. Memfasilitasi FGD gap analysis dan FGD penyusunan Peta Jalan secara partisipatif yang melibatkan Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, dan OPD terkait, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
4. Memfasilitasi konsultasi publik dokumen peta jalan yang telah disusun. Selain berperan sebagai fasilitator, Konsultan juga bertanggung jawab atas pengaturan kegiatan dan logistik (venue dan paket meeting).
5. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan berupa foto dan video.

IV. Deliverables

1. Laporan antara/inception report, berisi rencana kerja detail dan metodologi yang disepakati dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Tersedia hasil evaluasi pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030, Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan Renstra OPD terkait tahun 2024–2025, yang memuat perbandingan target dan realisasi, kesenjangan, serta potensi perbedaan sesuai lingkup RO FOLU yang dibuat dalam bentuk matrix meliputi : Data Baseline, target, indikator, analisis risiko, sumber verifikasi, pendanaan dan penanggung jawab.
3. Tersedia rekomendasi Renja FOLU Net Sink 2030 yang memiliki jalur integrasi ke Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan OPD terkait;
4. Tersedia Draf Final Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik

IV. Time Frame

Periode penugasan adalah dari 16 Oktober sampai 30 Desember 2026.

Kegiatan	Proses	Output	Waktu
Pengumpulan dan konsolidasi data dasar (baseline)	Tim mengumpulkan data dari Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, dan OPD terkait, antara lain: Renstra/Renja, peta kegiatan, laporan tahunan, laporan kemajuan berkala, serta data capaian pelaksanaan Renja FOLU Net Sink 2030 tahun 2024–2025	Data capaian terkonsolidasi dan hasil analisis awal kesenjangan antara rencana dan implementasi	W2-3 Oktober
FGD Gap Analisis	Pertemuan partisipatif untuk membahas hasil gap analysis serta melakukan klarifikasi dan konfirmasi data	Hasil gap analysis dan usulan penyempurnaan program dan sistem implementasi, termasuk target	W4 Oktober – W1 November
FGD Penyusunan Usulan Peta Jalan	Tim akan memfasilitasi FGD untuk menyusun Peta Jalan FOLU berbasis Gap Analysis partisipatif	- Draf Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 - Rekomendasi pemutakhiran Renja FOLU Net Sink 2030 serta perbaikan dan integrasi Renja Dinas Kehutanan, KPH, dan OPD terkait	W2-3 November
Penyusunan Dokumen	Tim Penyusun dan Tim Kecil menyusun dokumen Peta Jalan FOLU Net Sink 2030	Draf Final Peta Jalan FOLU Net Sink 2030	W4 November – W1 Desember
Konsultasi Publik	Tim Penyusun mempresentasikan Draf Final dan menyempurnakannya berdasarkan masukan para pihak	Perbaikan dokumen dan penyerahan Dokumen Peta Jalan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah	W2-3 Desember

IV. Budget

Adapun budget yang anggaran yang kegiatan ini senilai : Rp 100.000.000,-

No.	Uraian	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah
I.	<u>Jasa Konsultan</u>				<u>Rp 45.000.000</u>
a.	Ketua tim ahli	OB	2,00	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
b.	Anggota tim ahli	OB	2,00	Rp 7.500.000	Rp 15.000.000
II.	<u>Pengumpulan Data dan Pelaporan</u>				<u>Rp 54.960.000</u>
a.	Pengumpulan Data	pkt	2,00	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000

b.	FGD/Evaluasi	ls	1,00	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
c.	ATK & Campign materials	ls	1,00	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
d.	Konsultasi Publik	pkt	1,00	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
III	Pajak	pkt	2%	Rp 98.000.000	Rp 1.960.000
TOTAL I & II		TOTAL I & II			Rp 99.960.000

V. Qualifications

1. Memiliki latar belakang pendidikan S 2 (Strata 2) atau lebih, yang relevan, terutama ilmu lingkungan, kebijakan publik, ilmu sosial/pemberdayaan masyarakat
2. Berpengalaman minimal 10 tahun dalam penyusunan kebijakan terkait kehutanan dan lingkungan di Indonesia.
3. Berpengalaman dalam kegiatan yang terkait dengan isue pengurangan emisi, kehutanan dan/atau program pendampingan masyarakat pada 5 tahun terakhir.
4. Berpengalaman bekerja bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 10 tahun terakhir, terutama dengan Dinas Kehutanan dan Bappeda di Provinsi Sulawesi Tengah.

V. How to Apply

Para pihak yang berminat, dapat mengirimkan aplikasinya melalui <https://haris.kemitraan.or.id> berisi:

1. Proposal teknis
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan pada kegiatan ini. Termasuk di dalamnya biaya personel dan biaya kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. CV atau resume konsultan
4. Daftar pengalaman menyusun output serupa sedikitnya 3 pekerjaan terakhir, dengan format berikut ini:

Paket Pekerjaan	Output	Kapan	Nilai Biaya	Pemberi Kerja

VI. Signatures- Job Description Certification

Name	Signature	Date
Name	Signature	Date
Name	Signature	Date

[Note: ToR/Job Description Should Not Exceed 2 Pages]